

PKM PENGUATAN EKONOMI DESA MELALUI BUMDES DI DESA PINASUNGKULAN KECAMATAN TOMBARIRI

PKM VILLAGE ECONOMIC STRENGTHENING THROUGH BUMDES IN PINASUNGKULAN VILLAGE, TOMBARIRI DISTRICT

Daisy Shirly Marhaenie Engka¹, Anderson G Kumenaung², Jacline Indriany Sumual³

1,2,3) Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis /Universitas Sam Ratulangi

**Email Korespondensi: daisyyengka@unsrat.ac.id*

Article History:

Received: 25 Nov. 2025

Revised: 29 June 2025

Accepted: 10 August 2025

Keywords: *BUMDes, Village Government, Strengthening Village Economy*

Abstract

The Village-Owned Enterprise (BUMDes) institution is a village business unit managed by the community and village government in an effort to increase village economic growth and is formed based on the needs of community members and to develop village potential. The Community Partnership Program (PKM) aims to increase the capacity and performance of Village-Owned Enterprises (BUMDes) as the driving force of the economy in Pinasungkulan Village, Tombariri District. Problems faced by BUMDes include limited business management, low utilization of local potential, and a lack of effective marketing strategies. PKM activities are carried out through business management mentoring, village financial management training, product development based on local potential, and the implementation of digital marketing strategies. Implementation methods include counseling and training related to BumDes management. Based on the activity plan, the target outputs produced after the activity are: understanding the importance of BUMDes, the types of businesses that can be managed by villages, frequently encountered problems and their solutions, and how to manage BUMDes. The results of the Community Service Team showed that BumDes in Pinasungkulan Village, Tombariri District, has not been running well and has not been able to provide income for the Pinasungkulan Village Government due to the lack of human resources who have the capacity in both management and technology, even planning related to businesses that are capable of developing BumDes.

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Menurut undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa "Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa". Disebutkan pula bahwa tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam

rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa).

Pembentukan BUMDes merupakan suatu cara untuk memanfaatkan undangundang yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa, khususnya untuk meningkatkan perekonomian desa dan juga kesejahteraan untuk seluruh masyarakat desa (Saniyah 2019). Keberhasilan dari sebuah pembangunan dalam sebuah masyarakat tidak selalu ditentukan oleh sumber dana keuangan dan manajemen keuangan namun dipengaruhi oleh respon serta peran dari masyarakat.

Pendirian Badan Usaha Milik Desa ini disertai juga dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang ikut memfasilitasi dan menjaga keberlanjutan usaha masyarakat desa dari adanya ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat bahwa badan usaha milik Desa merupakan lembaga perekonomian baru yang beroperasi atau menjalankan usaha di pedesaan, sehingga mereka masih memerlukan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Landasan dasar bagi pendirian BUMDes adalah Pemerintah, baik pusat maupun daerah. BUMDes menjadi pilar kegiatan perekonomian di desa yang memiliki fungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. BUMDes dikatakan sebagai lembaga sosial yang berpihak kepada kepentingan masyarakat desa melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal yang dimiliki baik berupa barang maupun jasa.

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar.

Permasalahan Mitra

Berdasarkan analisis situasi maka salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah desa khusunya pengaruh BumDes ialah permasalahan terkait dengan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan dana BumDes dimana kurangnya sumber daya manusia yang mempunyai sehingga pengelolaan BumDes belum berjalan dengan maksimal. Ada juga beberapa permasalahan yang kerap dialami oleh BumDes yaitu terkait dengan manajemen, adanya akses internet (*e-commerce*) yang kurang maksimal, dan kurangnya inovasi untuk pengembangan usaha. Bahkan ada pula beberapa badan usaha kesulitan pembangunan organisasi yang valid dan berkualitas, sehingga BUMDES belum mampu berkontribusi besar terhadap pendapatan desa.

METODE PELAKSANAAN

Dalam pelaksanaan Program kemitraan masyarakat (PKM) ini digunakan metode berupa ceramah, pelatihan guna membantu dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman pengurus BumDes yang akan dan sementara dihadapi. Untuk pelaksanaan program ini, maka diperlukan serangkaian prosedur kerja dan kegiatan yang akan dilakukan bersama mitra, yaitu :

Persiapan

- a) Mempersiapkan para peserta untuk mengikuti penyuluhan dan pelatihan ini.
- b) Menyediakan tempat dan fasilitas lainnya yang diperlukan.
- c) Peserta diharapkan berperan aktif dalam tanya jawab.

Pelaksanaan

- a) Pelaksanaan ceramah dengan teknik dialogis, dimana Mitra berperan aktif untuk mengikuti Materi, melalui kegiatan ini diharapkan akan ada luaran berbentuk perubahan perilaku atau Maidset dalam pengelolaan keuangan BumDes.
- b) Bersama dengan Mitra melaksanakan atau memecahkan contoh -contoh kasus dalam pengelolaan keuangan.
- c) Penerapan IPTEKS ditempuh dengan cara pelatihan dan penyuluhan dengan latihan-latihan memecahkan kasus melalui praktik dengan menggunakan kertas kerja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program pengabdian kepada masyarakat ini telah sukses dilaksanakan dan berjalan lancar sesuai dengan yang direncanakan. Pelaksanaannya dilakukan pada hari Rabu 03 Juli 2024, yang bertempat di Desa Pinasungkulan Kec Tombariri Kab Minahasa dengan topik Penguatan Ekonomi Desa Melalui Bumdes Di Desa Pinasungkulan Kecamatan Tombariri . Adapun sasaran program adalah pengurus BUMDES dan Masyarakat.

Tabel 1 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Hari/Tanggal	Waktu	Materi	Ket
Rabu, 03 Juli 2024	12.30-13.00	Registrasi Pembukaan Kegiatan	Tim PKM
	13.00-14.00	Materi I	Dr. Daisy S.M.Engka.,SE.,MSi
	14.00-15.00	Materi II	Prof. Dr. Anderson G Kumaenang, SE.,MSi
	15.00-15.30	Tanya Jawab	Narasumber Materi 1 & 2
	15.30	Konsumsi dan penutup	Tim PKM
Tidak Terjadwal	10 Jam	Pendampingan penguatan ekonomi melalui bumdes	Tim PKM

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam keberlangsungannya selain memberikan keuntungan bagi Pendapatan Anggaran Desa (PADes) juga memberi keuntungan bagi para pelaku usaha, yang secara tidak langsung dapat memberi kontribusi dalam menguatkan perekonomian desa. Tim PKM melaksanakan penyuluhan dan pelatihan di Desa Pinasungkulan pada tanggal 03 Juli 2024 dengan topik Penguatan Ekonomi Desa Melalui Bumdes , dikatakan berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya peran BumDes bagi penguatan ekonomi di desa. Dilihat dari tingginya partisipasi dan antusias masyarakat dalam mengikuti kegiatan tersebut juga memberikan pengetahuan bagi para pelaksana PKM mengenai hambatan-hambatan pelaksanaan BumDes di Desa Pinasungkulan. Penguatan ekonomi bukan hanya berbicara

tentang sumber daya apa yang akan dikelola oleh BumDes melainkan memperhitungkan tentang profit yang diterima desa. Sehingga dalam pengelolaan BumDes membutuhkan anggota yang memiliki keahlian dan keterampilan untuk mengola sumber daya yang ada di desa menjadi sesuatu yang memiliki nilai jual yang tinggi.



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Ekonomi Pembangunan maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengurus BumDes Desa Pinasungkul belum memiliki kapasitas yang mumpuni dalam pengelolaan anggaran BumDes yang diberikan oleh Pemerintah Desa dilihat dari perkembangan BumDes yang belum bisa memberikan pemasukan pendapatan untuk pemerintah Desa Pinasungkul.
2. Terbatasnya sumber daya manusia yang mengerti tentang manajemen, teknologi serta strategi-strategi dalam pembuatan perencanaan terkait dengan usaha-usaha yang bisa membantu perkembangan BumDes.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas maka Tim Pengabdian dan Penelitian dapat memberikan saran sebagai

berikut :

1. Bagi pemerintah Desa Pinasungkul dapat memfasilitasi pengurus BumDes agar dapat mengikuti pelatihan-pelatihan untuk pengembangan pengetahuan terkait dengan pengelolaan BumDes baik dari segi anggaran maupun usaha-usahan yang akan dikembangkan.
2. Bagi pengurus BumDes agar bisa lebih inovasi dan kreatif dalam mengelolah keuangan yang diberikan oleh pemerintah desa.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih diucapkan kepada Rektor Unsrat dan Ketua LPPM Unsrat. Artikel ini merupakan bagian dan salah satu luaran dari Program Kemitraan Masyarakat Klaster 2 (PKM -K2) didanai oleh PNBP Universitas Sam Ratulangi Tahun 2024

DAFTAR PUSTAKA

1. Saniyah. (2019). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada BUMdes Kili Angkon di Desa Sukaraja Ulu Krui Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung: dipublikasikan.
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, (2004).